

**RENCANA KERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
TAHUN 2021**



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021 ini dapat diselesaikan. Pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran suatu pemerintahan sangat tergantung pada sistem perencanaan yang dikembangkan. Perencanaan pembangunan yang disusun harus berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan lainnya dan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki serta sesuai perkembangan dan dinamika yang berkembang sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai memuat rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 dan berpedoman pada Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021. RKPD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021 menjadi pedoman penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah.

Akhir kata, semoga dokumen Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021 ini dapat menjadi gambaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2021 serta dalam proses penganggaran dapat lebih terpadu, terarah serta konsisten dalam mencapai tujuan pembangunan dan dapat terlaksana sesuai dengan target yang diharapkan.

Sei Rampah, 03 Juli 2020

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**



**M. ZUHRI LUBIS, SE,M.AP
PEMBINA TK.I**

NIP. 19631230 198403 1 001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Landasan Hukum	1
1.3.Maksud dan Tujuan	3
1.4.Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU	5
2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD	5
2.2.Analisis Kinerja Pelayanan OPD	18
2.3.Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	19
2.4.Review Terhadap Rancangan Awal Renja.....	24
2.5.Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	24
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN	25
3.1.Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	25
3.2.Tujuan dan Sasaran Renja OPD	26
3.3.Program dan Kegiatan	26
BAB IV PENUTUP.....	31
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa setiap satuan kerja pemerintah diwajibkan membuat Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman kerja setiap satuan kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diembannya. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan rancangan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif yang mengacu kepada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021 merupakan rencana pelaksanaan tahun ke-VI Renstra Badan Pendapatan Daerah periode tahun 2016-2021.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021 disusun dengan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang- undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 05 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 01 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
22. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 ini adalah sebagai pedoman dan acuan bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama Periode Tahun 2021 yang tertuang di dalam program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021.

Adapun tujuan dibuatnya Renja Badan Pendapatan Daerah ini adalah :

1. Sebagai pengendali kegiatan di Badan Pendapatan Daerah agar terarah dan sesuai dengan Tujuan, Sasaran dan Program yang telah ditetapkan;

2. Tercapainya sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan;
3. Terwujudnya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan arah yang terpadu dengan strategi yang tepat dan terukur;
4. Sebagai pedoman penyusunan dan evaluasi kinerja kegiatan di Badan Pendapatan Daerah;
5. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi pengelolaan Pendapatan Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan dokumen perencanaan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021 terdiri atas 4 (Empat) Bab dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Renja
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Evaluasi pelaksanaan Renja OPD sebagaimana amanat PP Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, proses evaluasi harus dilakukan pada Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2018, yang memuat kajian (review) terhadap kinerja hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah mengaju pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk perangkat daerah yang bersangkutan. Adapun pokok-pokok materi pada bab ini adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
- f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

A. Evaluasi Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2019.

Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2019 dari pagu yang telah ditetapkan sebesar **Rp.1.613.960.310.260,00** terealisasi sebesar **Rp.1.573.881.543.896,19 (97,52%)** dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi Pendapatan Asli Daerah dari pagu yang telah ditetapkan sebesar Rp. 134.262.861.818,00 terealisasi sebesar Rp. 143.138.846.297,19 (106,61%), dengan rincian sebagai berikut :

a) Pendapatan Pajak Daerah

Realisasi pajak daerah dari pagu yang telah ditetapkan sebesar Rp. 68.080.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 70.986.677.981,00 (104,27%), dengan rincian sebagai berikut :

1) Pajak Hotel

Realisasi pajak hotel dari pagu yang telah ditetapkan sebesar Rp. 350.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 406.402.661,00 (116,12%).

2) Pajak Restoran

Realisasi pajak restoran dari pagu yang telah ditetapkan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 3.398.149.063,00 (113,27%).

3) Pajak Hiburan

Realisasi pajak hiburan dari pagu yang telah ditetapkan sebesar Rp. 1.250.000.000,00,- terealisasi sebesar Rp. 1.004.372.551,00 (80,35%).

4) Pajak Reklame

Realisasi pajak reklame dari pagu yang telah ditetapkan sebesar Rp. 1.800.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.925.860.273,00 (106,99%).

5) Pajak Penerangan Jalan PLN

Realisasi pajak penerangan jalan PLN dari pagu yang telah ditetapkan sebesar Rp. 29.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 30.524.359.880,00 (105,26%).

6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan dari pagu yang telah ditetapkan sebesar Rp. 4.500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 4.211.942.659,00 (93,60%).

7) Pajak Parkir

Realisasi pajak parkir dari pagu yang telah ditetapkan sebesar Rp. 350.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 271.795.935,00 (77,66%).

8) Pajak Air Tanah

Realisasi pajak air tanah dari pagu yang telah ditetapkan sebesar Rp. 800.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 787.950.120,00 (98,49%).

9) Pajak Sarang Burung Walet

Realisasi pajak sarang burung walet dari pagu yang telah ditetapkan sebesar Rp. 30.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 31.000.000,00 (103,33%).

10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Realisasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dari pagu yang telah ditetapkan sebesar Rp. 19.500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 21.801.183.364,00 (111,80%).

11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPTB)

Realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPTB) dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dari pagu yang telah ditetapkan sebesar Rp. 7.500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 6.623.661.475,00 (88,32%).

b) Retribusi Daerah

Realisasi retribusi daerah dari pagu yang telah ditetapkan sebesar Rp. 21.476.137.000,00 terealisasi sebesar Rp. 24.986.416.820,00 (116,35%).

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dari pagu yang telah ditetapkan sebesar Rp. 9.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 7.911.470.925,00 (87,91%).

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah dari pagu yang telah ditetapkan sebesar Rp. 35.706.724.818,00 terealisasi sebesar Rp. 39.254.280.571,19 (109,94%).

2. Dana Perimbangan

Realisasi dana perimbangan dari pagu yang telah ditetapkan sebesar Rp. 1.122.933.426.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.077.175.098.960,00 (95,93%), dengan rincian sebagai berikut :

a) Dana Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak

Realisasi dana bagi hasil pajak / bukan pajak dari pagu yang telah ditetapkan sebesar Rp. 53.553.472.000,00 terealisasi sebesar Rp. 38.160.915.691,00 (71,26%).

b) Dana Alokasi Umum

Realisasi dana alokasi umum dari pagu yang telah ditetapkan sebesar Rp. 799.392.981.000,00 terealisasi sebesar Rp. 798.240.981.000,00 (99,86%).

c) Dana Alokasi Khusus

Realisasi dana alokasi khusus dari pagu yang telah ditetapkan sebesar Rp. 269.986.973.000,00 terealisasi sebesar Rp. 240.773.202.269,00 (89,18%).

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Realisasi penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dari pagu yang telah ditetapkan sebesar Rp. 356.764.022.442,00 terealisasi sebesar Rp. 353.567.598.639,00 (99,10%), dengan rincian sebagai berikut :

a) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

Realisasi dana bagi hasil pajak dari provinsi dari pagu yang telah ditetapkan sebesar Rp. 89.008.549.520,00 terealisasi sebesar Rp. 88.539.296.639,00 (99,47%).

b) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

Realisasi dana penyesuaian dan otonomi khusus (Alokasi Dana Desa) dari pagu yang telah ditetapkan sebesar Rp. 184.774.302.000,00 terealisasi sebesar Rp. 184.774.302.000,00 (100,00%).

c) Pendapatan Hibah

Realisasi pendapatan hibah dari pagu yang telah ditetapkan sebesar Rp. 82.981.170.922,00 terealisasi sebesar Rp. 80.254.000.000,00 (96,71%).

B. Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2019

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 1.903.951.359,- dengan realisasi sebesar Rp 1.880.513.201,- atau sebesar 98,77%, outcome program ini adalah meningkatnya pelayanan administrasi dan informasi kepada masyarakat sebesar 100% yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan :

- 1.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.121.595,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.174.400,- atau 97,83%. Keluaran (output) dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat selama 1 tahun.
- 1.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 446.840.456,- dan terealisasi sebesar Rp. 437.138.382,- atau 97,83%. Keluaran (output) kegiatan ini yaitu Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional sebanyak 10 unit.
- 1.3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 146.798.730,- dan terealisasi sebesar Rp. 146.700.000,- atau 99,93%. Keluaran (output) kegiatan ini adalah terpeliharanya kebersihan kantor, tersedianya alat kebersihan seperti kain pel, keranjang sampah, pembersih lantai dan lain-lain serta jasa untuk cleaning service sebanyak 5 orang untuk keperluan selama 1 tahun.
- 1.4. Penyediaan Alat Tulis Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 459.984.114,- dan terealisasi sebesar Rp. 459.856.000,- atau 99,97%. Keluaran (output) kegiatan ini adalah tersedianya Alat Tulis Kantor yang memperlancar Administrasi Perkantoran untuk keperluan selama 1 tahun.

- 1.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 414.244.360,- dan terealisasi sebesar Rp. 414.010.000,- atau 99,94%. Keluaran (output) kegiatan ini adalah Terpenuhinya kebutuhan cetak dan dokumen penggandaan dokumen untuk keperluan selama 1 tahun.
- 1.6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 38.239.255,- dan terealisasi sebesar Rp. 38.200.000,- atau 99,90%. Keluaran (output) kegiatan ini adalah Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor untuk keperluan selama 1 tahun.
- 1.7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 25.773.096,- dan terealisasi sebesar Rp. 21.675.000,- atau 84,23%. Keluaran (output) kegiatan ini yaitu tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan untuk keperluan selama 1 tahun.
- 1.8. Penyediaan Makanan dan Minuman, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 93.865.650,- dan terealisasi sebesar Rp. 93.800.000,- atau 99,93%. Keluaran (output) kegiatan ini yaitu Tersedianya makanan dan minuman dalam pelaksanaan rapat dan kunjungan untuk keperluan selama 1 tahun.
- 1.9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 134.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 133.509.419,- atau 99,63%. Keluaran (output) Terlaksananya koordinasi dan konsultasi perjalanan dinas ke luar daerah untuk keperluan selama 1 tahun.
- 1.10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.250.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.250.000,- atau 100,00%. Keluaran (output) Terlaksananya koordinasi dan konsultasi perjalanan dinas ke dalam daerah untuk keperluan selama 1 tahun.

- 1.11. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 71.553.300,- dan terealisasi sebesar Rp. 71.550.000,- atau 100,00%. Keluaran (output) kegiatan ini adalah dibayarkannya jasa petugas jaga malam dan supir sebanyak 2 orang yang digaji selama 12 bulan.
- 1.12. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 36.007.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 29.250.000,- atau 81,23%. Keluaran (output) kegiatan ini adalah dibayarkannya honorarium panitia pengadaan barang dan jasa selama 1 tahun.
- 1.13. Pelayanan administrasi dan arsip OPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 22.313.603,- dan terealisasi sebesar Rp. 21.400.000,- atau 95,91%. Keluaran (output) kegiatan ini adalah terlaksananya pelayanan administrasi dan arsip OPD selama 1 tahun.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 327.311.458,- dengan realisasi sebesar Rp 321.360.000,- atau sebesar 98,18%, outcome program ini adalah terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur sebesar 100% yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan :

- 2.1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 103.267.458,- dan terealisasi sebesar Rp. 97.560.500,- atau 94,47%. Keluaran (output) kegiatan ini adalah Peralatan Gedung Kantor berupa Belanja Modal pengadaan Laptop, Printer, Scanner, Alat Penghancur Kertas, dan Genset untuk keperluan kebutuhan dan peralatan pendukung pelaksanaan tugas.
- 2.2. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 44.044.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 43.884.500,- atau 99,64%. Keluaran (output) kegiatan ini adalah dilaksanakannya pemeliharaan gedung dan bangunan berupa pemeliharaan ruangan loket pelayanan paja.

2.3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 180.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 179.915.000,- atau 99,95%. Keluaran (output) kegiatan ini adalah terlaksananya pemeliharaan AC, komputer PC, server, instalasi jaringan listrik, software aplikasi, jaringan komputer dan alat perforasi selama 1 tahun.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 6.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp 6.000.000,- atau sebesar 100,00%, outcome program ini adalah persentase ASN yang mengikuti diklat Peningkatan Kompetensi Teknis dan Fungsional sebesar 10% yang dilaksanakan melalui kegiatan:

3.1 Bimbingan Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.000.000,- atau 100,00%. Keluaran (output) kegiatan ini adalah Jumlah PNS yang mengikuti bimtek pengelolaan pendapatan daerah yaitu sebanyak 3 orang.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 73.965.000,- dengan realisasi sebesar Rp 73.850.000,- atau sebesar 99,84%, outcome program ini adalah persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan sebesar 100% yang dilaksanakan melalui kegiatan:

4.1 Pembuatan Laporan Pendapatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 73.965.000,- dan terealisasi anggaran sebesar Rp. 73.850.000,- atau 99,84%. Keluaran (output) kegiatan ini adalah tersedianya 1 dokumen laporan pendapatan daerah.

5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 16.601.911,- dan terealisasi sebesar Rp 15.850.000,- atau sebesar 95,47%, outcome program ini adalah

persentase keluhan yang ditindaklanjuti sebesar 100% yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan:

- 5.1 Survey Indeks Kepuasan Masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.995.311,- dan terrealisasi sebesar Rp. 9.850.000,- atau 98,55%. Keluaran (output) kegiatan ini adalah diperolehnya nilai kepuasan masyarakat atas pelayanan pajak daerah oleh Badan Pendapatan Daerah sebesar 80.
- 5.2 Operasional pelayanan pajak daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.606.600,- realisasi anggaran sebesar Rp. 6.000.000,- atau 90,82%. Keluaran (output) kegiatan ini adalah terlaksananya pelayanan pajak daerah keliling.

6. Program Peningkatan PAD

Program Peningkatan PAD mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 2.191.274.440,- dengan realisasi sebesar Rp 2.182.241.824,- atau sebesar 99,59%, outcome program ini adalah tercapainya realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar 9,09% dari total pendapatan daerah, yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan:

- 6.1 Penagihan Pajak Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 669.600.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 669.450.000,- atau 99,98%. Keluaran (output) dari kegiatan ini adalah tertagihnya tunggakan pajak daerah sebanyak Rp. 9.804.721.622,-.
- 6.2 Pendataan Pajak Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 489.600.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 489.600.000,- atau 100,00%. Keluaran (output) kegiatan ini adalah jumlah wajib pajak daerah baru yang di data sebanyak 4.215 wajib pajak.
- 6.3 Koordinasi PPJ PLN, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 22.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 22.765.624,- atau 99,85%. Keluaran (output) kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan koordinasi Pajak Penerangan Jalan ke Kantor PLN Cabang Lubuk Pakam dan Pematang Siantar sebanyak 12 kegiatan.

- 6.4 Cetak Massal SPPT dan DHKP PBB, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 79.838.240,- dan terealisasi sebesar Rp. 78.700.000,- atau 98,57. Keluaran (output) kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan Cetak Massal SPPT dan DHKP PBB secara tepat waktu.
- 6.5 Rapat Koordinasi Pengelolaan PAD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 83.024.030,- dan terealisasi sebesar Rp. 82.798.000,- atau 99,73%. Keluaran (output) dari kegiatan ini adalah terlaksananya Rapat Koordinasi Pengelolaan PAD sebanyak 4 kegiatan.
- 6.6 Kegiatan Penelitian dan Verifikasi SSPD BPHTB, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 19.920.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 19.675.000,- atau 98,77%. Keluaran (output) dari kegiatan adalah terlaksananya kegiatan penelitian dan verifikasi sebanyak 2.145 SSPD BPHTB.
- 6.7 Kegiatan Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 74.716.240,- dan terealisasi sebesar Rp. 69.700.000,- atau 93,29%. Keluaran (output) dari kegiatan ini adalah terbitnya nota perhitungan dan surat ketetapan pajak daerah sebanyak 228.490 nota.
- 6.8 Rekonsiliasi Penerimaan PAD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 83.738.550,- dan terealisasi sebesar Rp. 83.500.000,- atau 99,72%. Keluaran (output) dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen Penerimaan PAD yang akurat dari hasil 4 kegiatan rekonsiliasi data PAD dengan 11 OPD pengelola PAD.
- 6.9 Pengadaan Hardware/Software Sistem Informasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 37.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 36.400.000,- atau 98,38%. Keluaran (output) dari kegiatan ini adalah diadakannya 4 unit mini komputer untuk sistem informasi.

6.10 Verifikasi Tunggalan PBB P2, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 571.577.980,- dan terealisasi sebesar Rp. 571.153.200,- atau 99,93%. Keluaran (output) dari kegiatan ini adalah tersedianya data piutang tunggalan PBB P2 yang akurat pada 17 kecamatan.

6.11 Pemeliharaan Hardware/Software Sistem Informasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 59.459.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 586.500.000,- atau 98,39%. Keluaran (output) dari kegiatan ini adalah sistem informasi beroperasi lancar selama 1 tahun.

7. Program Peningkatan/Pembinaan Sadar Pajak

Program Peningkatan/Pembinaan Sadar Pajak mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 176.177.536,- dengan realisasi sebesar Rp 172.400.000,- atau sebesar 97,86%, outcome program ini adalah tercapainya persentase wajib pajak yang taat membayar pajak sebesar 58,81%, yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan :

7.1 Pembuatan Media Informasi Pajak Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.310.910,- dan terealisasi sebesar Rp. 50.000.000,- atau 99,38%. Keluaran (output) dari kegiatan ini adalah terlaksananya pembuatan media informasi pajak daerah berupa baliho dan spanduk yang terpasang diseluruh desa sebanyak 209 buah.

7.2 Pemeriksaan Pajak Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 91.680.180,- dan terealisasi sebesar Rp. 91.400.000,- atau 99,69%. Keluaran (output) dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemeriksaan terhadap 11 wajib pajak daerah.

7.3 Promosi Pajak Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 34.186.446,- dan terealisasi sebesar Rp. 31.000.000,- atau 90,68%. Keluaran (output) dari kegiatan ini adalah terlaksananya 2 kegiatan pameran pajak daerah dengan jumlah pengunjung stand sebanyak 607 orang.

C. Proyeksi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun Berjalan (Tahun 2020)

c.1. Proyeksi Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2020

Target penerimaan pendapatan daerah sebagaimana yang terdapat pada dokumen APBD tahun 2020 adalah sebesar Rp.1.665.849.841.312,-. Dari target pendapatan daerah tersebut Badan Pendapatan Daerah memiliki tanggung jawab pencapaian pada sektor Pendapatan Asli Daerah dengan target sebesar Rp. 92.870.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Program/Kegiatan		Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Asli Daerah		92.870.000.000	35.773.957.432	38,52
a.	Pajak Daerah	68.970.000.000	26.604.009.360	38,57
1)	Pajak Hotel	400.000.000	148.140.935	37,04
2)	Pajak Restoran	3.000.000.000	1.139.872.181	38,00
3)	Pajak Hiburan	1.350.000.000	229.255.650	16,98
4)	Pajak Reklame	2.000.000.000	754.054.999	37,70
5)	Pajak Penerangan Jalan	29.000.000.000	14.814.087.813	51,08
6)	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.500.000.000	1.807.427.262	40,17
7)	Pajak Parkir	370.000.000	60.416.444	16,33
8)	Pajak Air Tanah	820.000.000	317.560.271	38,73
9)	Pajak Sarang Burung Walet	30.000.000	4.500.000	15,00
10)	PBB P2	20.000.000.000	2.257.836.152	11,29
11)	BPHTB	7.500.000.000	5.070.857.653	67,61
b.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	10.400.000.000	5.619.713.342	54,04
1)	Bagian Laba Penyertaan Modal pada PT. BANK SUMUT	10.400.000.000	5.619.713.342	54,04
c.	Lain-lain PAD yang Sah	13.500.000.000	3.550.234.730	26,30
1)	Jasa Giro	3.000.000.000	1.699.929.753	56,66
2)	Pendapatan Bunga Deposito	6.000.000.000	0	0,00
3)	Lain-lain PAD yang Sah	4.500.000.000	1.850.304.977	41,12

(Realiasi Pendapatan Asli Daerah per 30 Juni 2020)

Sejak akhir bulan Februari 2020 hingga saat ini pandemic covid-19 masih berlangsung dan sangat berpengaruh terhadap aktifitas perekonomian masyarakat yang secara langsung pula berpengaruh pada penerimaan daerah khususnya di sektor pajak daerah, diproyeksikan realisasi capaian target kinerja penerimaan pendapatan asli daerah tahun 2020 tidak akan tercapai, sehingga diperkirakan akan mengalami penurunan sekitar 30% dari target tersebut.

c.2. Proyeksi Hasil Pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun 2020

Berdasarkan DPA-OPD Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020 jumlah anggaran Belanja Langsung yaitu sebesar Rp. 3.900.700.000,- yang dilaksanakan dalam 7 program dan 30 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

Belanja		Anggaran	Realisasi	%
Belanja Langsung		3.900.700.000,00	1.803.862.717,00	46,24
1)	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.550.121.900,00	725.713.777,00	46,82
a)	Penyediaan jasa surat menyurat	4.300.000,00	1.756.000,00	40,84
b)	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	387.158.000,00	181.774.777,00	46,95
c)	Penyediaan jasa kebersihan kantor	130.762.150,00	56.800.000,00	43,44
d)	Penyediaan alat tulis kantor	399.742.000,00	199.438.000,00	49,89
e)	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	336.224.000,00	167.880.000,00	49,93
f)	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	29.934.750,00	14.970.000,00	50,01
g)	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	22.600.000,00	5.650.000,00	25,00
h)	Penyediaan makanan dan minuman	54.991.000,00	27.460.000,00	49,94
i)	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	51.700.000,00	25.175.000,00	48,69
j)	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	17.700.000,00	4.425.000,00	25,00
k)	Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis	69.750.000,00	26.075.000,00	37,38
l)	Panitia pengadaan barang dan jasa	29.200.000,00	1.750.000,00	5,99
m)	Pelayanan administrasi dan arsip OPD	16.060.000,00	12.560.000,00	78,21
2)	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	171.780.000,00	83.475.000,00	56,58
a)	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	24.250.000,00	0	0,00
b)	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	147.530.000,00	83.475.000,00	56,58
3)	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	30.000.000,00	0,00	0,00
	Bimbingan Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah	30.000.000,00	0,00	0,00
4)	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	44.641.600,00	0,00	0,00
a)	Pembuatan laporan pendapatan	44.641.600,00	0,00	0,00
5)	Program Peningkatan PAD	1.919.716.700,00	920.030.640,00	47,93
a)	Penagihan pajak daerah	608.000.000,00	219.775.000,00	36,15

Belanja			Anggaran	Realisasi	%
	b)	Pendataan pajak daerah	684.626.000,00	341.825.000,00	49,53
	c)	Koordinasi PPJ PLN	17.550.000,00	8.250.000,00	47,01
	d)	Rapat koordinasi pengelolaan PAD	71.312.700,00	35.615.000,00	49,94
	e)	Kegiatan Penelitian dan Verifikasi SSPD BPHTB	16.845.000,00	3.548.000,00	21,06
	f)	Kegiatan perhitungan dan penetapan pajak daerah	76.425.600,00	76.400.000,00	99,97
	g)	Rekonsiliasi penerimaan PAD	69.431.600,00	34.700.000,00	49,98
	i)	Pengadaan hardware/software sistem informasi	180.000.000,00	29.540.500,00	16,41
	j)	Verifikasi Tunggakan PBB	195.525.800,00	170.377.140,00	87,14
6)	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan		20.696.300,00	12.096.300	58,45
	a)	Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	9.996.300,00	9.996.300,00	100,00
	b)	Kegiatan Penanganan Keberatan, Pengurangan dan Kompensasi	10.700.000,00	2.100.000,00	19,63
7)	Program Peningkatan/Pembinaan Sadar Pajak		163.743.500,00	62.547.000,00	38,20
	a)	Pembuatan Media Informasi Pajak Daerah	57.550.000,00	34.550.000,00	60,03
	b)	Pemeriksaan Pajak Daerah	106.193.500,00	27.997.000,00	26,36

(Realiasi Belanja per 30 Juni 2020)

Proyeksi realisasi capaian target kinerja seluruh program yaitu mencapai 100%. Sedangkan proyeksi realisasi capaian target kinerja keluaran masing-masing kegiatan yaitu mencapai 100%.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Analisis kinerja pelayanan OPD berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD dengan kinerja yang dibutuhkan, dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut, serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan OPD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Untuk mengidentifikasi kinerja pelayanan OPD digunakan beberapa indikator diantaranya mengacu Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan sasaran target sesuai dengan Renstra OPD dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

Analisis gambaran kinerja pelayanan OPD Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah di

Kabupaten Serdang Bedagai menggunakan beberapa indikator kinerja yang disebut Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu:

- 1) Persentase realiasi penerimaan pajak daerah;
- 2) Persentase realisasi PAD terhadap pendapatan daerah;
- 3) Persentase wajib pajak yang membayar pajak daerah; dan
- 4) Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pelayanan pajak daerah.

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) dari Tahun 2016-2021 dapat dijelaskan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	SPM/ Standar Nasional	IKK Tahun 2021	Target Renstra OPD						Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1. Persentase realisasi penerimaan pajak daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	102,05 %	96,91 %	93,21 %	104,27 %	100%	100%	
2. Persentase PAD terhadap pendapatan daerah			6,5 %	6,7 %	13,59 %	8,03 %	9,09 %	10,00 %	7,54 %	7,48 %	12,43 %	9,09 %	9,09 %	10,00 %	
3. Persentase wajib pajak yang membayar pajak daerah			62,08 %	67,04 %	64,58 %	71,04 %	78,15 %	85,97 %	57,15 %	59,88 %	61,04 %	58,81 %	78,15 %	85,97 %	
4. IKM bidang pelayanan pajak daerah			63	68	73	78	82	82	NA	70	79	80	80	85	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber penerimaan daerah khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal di dalam koridor peraturan perundangundangan yang berlaku termasuk pajak daerah oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai sebagai lembaga teknis penghasil PAD dalam bidang pajak daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada

Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, terdapat beberapa isu penting dalam penyeleggaran tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai yang telah disusun menjadi tujuan dan sasaran sebagaimana telah diajabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah. Renstra tersebut merupakan suatu yang akan dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dalam jangka waktu 6 (enam) tahun yang terbagi dalam kurun waktu tahunan sesuai penentuan APBD.

Dalam menjalankan fungsinya tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dihadapkan pada beberapa permasalahan, yaitu :

1) Pajak Hotel

Pengelola hotel belum dapat melaksanakan pembayaran pajak hotel sesuai dengan tingkat hunian hotel, tetapi masih bersifat *lump sum* (ditetapkan sesuai kemampuan pengelola hotel).

2) Pajak Restoran

a) Pengelola restoran belum dapat melaksanakan pembayaran pajak restoran sesuai dengan nilai penjualan makanan dan minuman, tetapi masih bersifat *lump sum* (ditetapkan sesuai kemampuan pengelola restoran).

b) Masih banyak restoran menengah/kecil yang tidak berkenan membayar pajak dengan berbagai dalih diantaranya masih minimnya pendapatannya.

3) Pajak Hiburan

Masih kurangnya kesadaran pengelola tempat hiburan dalam menyampaikan jumlah pajak hiburan yang seharusnya untuk dibayarkan, dan belum maksimalnya pengawasan tiket karcis pajak hiburan.

4) Pajak Reklame

a) Banyak ditemukan spanduk/baliho yang terpasang namun tidak membayar pajak.

b) Belum optimalnya sosialisasi pajak reklame kepada badan/wajib pajak reklame/ pemilik usaha mengenai ketentuan pajak reklame.

- c) Belum maksimalnya penertiban reklame yang sudah kedaluarsa dan tidak membayar pajak.
- 5) Pajak Penerangan Jalan PLN
Tidak diperolehnya data base pembayaran listrik pelanggan oleh pihak PT. PLN sehingga dalam menghitung Pajak Penerangan Jalan hanya berdasarkan pada data yang dilaporkan oleh PT. PLN saja.
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - a) Ditemukan kegiatan pengambilan bahan galian C yang tidak memiliki izin.
 - b) Wajib pajak galian C belum memiliki kesadaran untuk melaporkan pajak galian C nya secara mandiri.
 - c) Sulit ditemuinya pemilik usaha galian C.
- 7) Pajak Parkir
Perlu dilakukan sosialisasi kepada para pengelola tempat parkir khususnya dikawasan objek wisata.
- 8) Pajak Air Tanah
 - a) Belum tersosialisasinya pajak air tanah kepada pemilik usaha-usaha kecil menengah.
 - b) Pembayaran air bawah tanah masih hanya berdasarkan pengakuan dari wajib pajak tanpa ada alat ukur penggunaan air bawah tanah.
- 9) Pajak Sarang Burung Walet
Wajib pajak sarang burung walet sulit ditemui karena berdomisili di luar daerah.
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
 - a) Masih banyak ditemukan kesalahan data wajib pajak PBB, sehingga wajib pajak enggan membayar PBB.
 - b) Objek pajak yang telah diperjualbelikan baik secara keseluruhan maupun sebahagian tidak dilaporkan kepada Badan Pendapatan Daerah sehingga SPPT PBB yang terbit masih atas nama wajib pajak yang lama dan akibatnya wajib pajak yang lama tidak mau membayar pajak lagi karena merasa sudah bukan menjadi tanggungjawabnya lagi.

- c) Belum terdatanya wajib pajak non ijin usaha perkebunan, sehingga belum terdaftar dalam DHKP PBB.
 - d) Wajib pajak tidak ingin di data objek pajaknya serta sulit ditemui/dihubungi karena berdomisili di luar Kabupaten Serdang Bedagai.
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPTB)
- a) Masih minimnya nilai jual objek pajak PBB, sehingga banyak transaksi jual beli objek pajak tanah dan bangunan yang tidak terkena BPHTB.
 - b) Wajib pajak enggan menyampaikan harga sebenarnya nilai jual objek pajak.
 - c) Belum adanya ZNT di Kabupaten serdang Bedagai sehingga perhitungan nilai BPHTB tidak optimal.
- 12) Masih minimnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak sebelum jatuh tempo.
- 13) Terdapat beberapa jenis tarif pajak yang nilainya ditetapkan belum maksimal dari ketentuan peraturan sehingga penerimaan pajak tidak maksimal.
- 14) Belum maksimalnya sistem yang mendorong manajemen sistem informasi pelayanan perpajakan dan kemudahan dalam pembayaran pajak, khususnya pelayanan perpajakan yang berbasis Informasi dan Teknologi (IT)
- 15) Pandemic covid 19 yang dimulai sejak akhir bulan Februari 2020 yang lalu dan hingga saat ini masih berlangsung dan belum diketahui kapan akan berakhirnya, sangat mempengaruhi aktifitas perekonomian masyarakat yang secara langsung pula berpengaruh pada penerimaan daerah khususnya di sektor pajak daerah.
- 16) Tantangan dalam hal profesionalisme dan integritas SDM Pelayanan Pajak (Aparatur) dalam pelayanan perpajakan.
- 17) Belum adanya kajian potensi penerimaan pajak daerah dengan Analisa Potensi Penerimaan Pajak Daerah dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah, terdapat faktor-faktor penghambat dan

pendorong atas pelayanan yang diberikan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Berikut faktor penghambat dan faktor pendorong yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah yaitu :

Faktor Penghambat:

- 1) Kualitas dan penempatan SDM
 - a) Belum terpenuhinya jumlah PNS yang memadai, sehingga masih dibantu oleh tenaga kontrak;
 - b) Belum tersedianya SDM yang terlatih, khususnya dalam bidang penyuluhan pajak, penilaian PBB, dan pemeriksa pajak;
 - c) Belum sempurnanya KPI ("*Key Performance Indicators*") untuk Analisis Beban Kerja (ABK) masing-masing personal;
 - d) Belum maksimalnya anggaran untuk peningkatan kompetensi aparatur dalam pengelolaan pendapatan daerah.
- 2) Sarana dan prasarana
 - a) Belum memadainya sarana dan prasarana yang terdapat pada loket pelayanan pembayaran pajak daerah;
 - b) Sarana mobil pelayanan pajak keliling yang belum dapat melayani pembayaran semua jenis mata pajak daerah;
 - c) Tidak tersedia ZNT untuk membantu perhitungan BPHTB
 - d) Tidak tersedianya gudang penyimpanan arsip pajak daerah.
- 3) Belum adanya regulasi yang sesuai dengan peraturan, perundang-undangan dan peraturan bupati yang disesuaikan kondisi yang ada/terkini;
- 4) Kesadaran dan pemahaman wajib pajak terhadap pajak daerah masih kurang;
- 5) Pengelolaan piutang pajak daerah belum optimal.

Sedangkan faktor pendorong untuk meningkatkan kinerja guna tercapainya tujuan dan sasaran sehingga dapat teratasi sehingga dapat diselesaikannya permasalahan-permasalahan yang ada, yaitu:

Faktor Pendorong

- 1) Adanya *Political Will* dari kepala daerah;
- 2) Pertumbuhan wisata dan pelaku usaha yang tinggi;

- 3) Adanya komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai baik PNS maupun tenaga kontrak untuk memenuhi target penerimaan pajak daerah;
- 4) Adanya potensi pajak masih besar;
- 5) Disusunnya regulasi peraturan pajak.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Renja

Telaahan terhadap rancangan awal Renja dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra OPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh OPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap OPD berdasarkan rancangan awal Renja. Review terhadap rancangan awal Renja, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk OPD yang bersangkutan, yang dilakukan melalui tahapan :

1. Membandingkan antara rancangan awal Renja dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal Renja, misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan tidak terdapat di rancangan awal Renja, atau program dan kegiatan tidak cocok untuk tercapainya sasaran strategis OPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Khusus untuk Badan Pendapatan Daerah, tidak ada usulan program/kegiatan khusus yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan SKPD, LSM, asosiasi-asosiasi, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Badan Pendapatan Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan, serta dari pelaksanaan Musrenbang tahun ini.

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Penelaahan terhadap kebijakan nasional menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai. Yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

Sedangkan kebijakan provinsi yang dicermati berupa arah kebijakan dan fokus pembangunan di wilayah Provinsi Sumatera Utara yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 05 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023.

Prioritas nasional yang sesuai dengan tupoksi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai yaitu Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah sebagai lembaga/institusi yang mempunyai tugas menghimpun dana pendapatan daerah. Meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa dalam pengelolaan pendapatan daerah dilakukan secara transparan, yaitu semua penerimaan daerah, belanja daerah dan pembiayaan defisit anggaran dilakukan melalui mekanisme APBD. Akuntabel adalah pengelolaan keuangan daerah yang berlandaskan asas profesionalitas, proporsionalitas dan keterbukaan.

Kegiatan prioritas diantaranya ; Optimalisasi penerimaan pendapatan daerah khususnya sektor PAD; optimalisasi pengawasan dalam rangka mendukung fungsi *community protection* serta melaksanakan fungsi sebagai border management dan kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan governance, dan penguatan kelembagaan adalah Organisasi yang *It for purpose*, SDM yang kompetitif, Sistem informasi manajemen yang terintegrasi, peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan pendapatan daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Penetapan tujuan dan sasaran organisasi didasarkan pada faktor-faktor kunci pendukung keberhasilan dari tujuan dan sasaran dirumuskan dalam bentuk yang lebih tepat dan terarah dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan sebagaimana yang terdapat pada Rencana Strategis OPD. Adapun tujuan dan sasaran rencana kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021 yaitu :

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
Optimalisasi penerimaan pendapatan daerah	1. Tercapainya target penerimaan pendapatan daerah	1. Persentase realisasi penerimaan pajak daerah	100%
		2. Persentase realisasi PAD terhadap pendapatan daerah	10,00%
		3. Persentase wajib pajak yang membayar pajak daerah	85,97%
	2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan pajak daerah	Nilai IKM bidang pelayanan pajak daerah	85

3.3 Program dan Kegiatan

a. Target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021

Adapun target pendapatan penerimaan pendapatan asli daerah yang dikelola Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai pada Tahun 2021 di proyeksikan sebesar Rp. 115.260.000.000,- yang terbagi kedalam Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah.

Berikut disajikan proyeksi Target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021 dimaksud sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini :

**Proyeksi Target Pendapatan Asli Daerah
Yang dikelola Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021**

NO	URAIAN	TARGET (Rp)
	<i>Pendapatan Asli daerah</i>	<i>115.260.000.000,-</i>
1	Pajak daerah	73.360.000.000,-
	1). Pajak Hotel	500.000.000,-
	2). Pajak Restoran	3.500.000.000,-
	3). Pajak Hiburan	1.500.000.000,-
	4). Pajak Reklame	2.400.000.000,-
	5). Pajak Penerangan Jalan	31.000.000.000,-
	6). Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan	1.000.000.000,-
	7). Pajak Parkir	380.000.000,-
	8). Pajak Air Tanah	900.000.000,-
	9). Pajak Sarang Burung Walet	30.000.000,-
	10).PBB-P2	24.150.000.000,-
	11).BPHTB	8.000.000.000,-
2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	18.000.000.000,-
3	Lain-Lain PAD yang Sah	23.900.000.000,-
	1). Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	400.000.000,-
	2. Penerimaan Jasa Giro	5.000.000.000,-
	3. Pendapatan Bunga Deposito	13.000.000.000,-
	4. Lain-lain PAD yang Sah lainnya	5.500.000.000,-

b. Belanja

Dalam mencapai target PAD yang menjadi tugas Badan Pendapatan Daerah, disusunlah rencana program dan kegiatan prioritas tahun 2021, yang merupakan hasil dari rangkaian proses perencanaan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan perencanaan baik teknokratik, partisipatif, *topdown* dan *bottom-up*. Rencana program dan kegiatan Tahun 2021 memuat urusan penunjang yang menjadi tupoksi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Selain itu, rencana program dan kegiatan disusun dengan mencantumkan rencana pendanaan dan sumber pendanaan, baik yang berasal dari dana APBN, APBD Provinsi Sumatera Utara, dan APBD Kabupaten Serdang Bedagai. Rencana program dan kegiatan juga sudah memuat lokasi pelaksanaan dan prakiraan kebutuhan dana pada Tahun 2021 yang terdiri dari :

a. Program pelayanan administrasi perkantoran

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dengan sasaran meningkatnya kinerja pelayanan OPD. Program ini meliputi beberapa kegiatan diantaranya adalah :

- 1) Penyediaan jasa surat menyurat;
- 2) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;
- 3) Penyediaan jasa kebersihan kantor;
- 4) Penyediaan alat tulis kantor;
- 5) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- 6) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
- 7) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
- 8) Penyediaan makanan dan minuman;
- 9) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
- 10) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah;
- 11) Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis;
- 12) Panitia pengadaan barang dan jasa;
- 13) Pelayanan dokumentasi dan arsip OPD.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparatur pemerintah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi. Program ini meliputi beberapa kegiatan diantaranya adalah :

- 1) Pengadaan peralatan gedung kantor;
- 2) Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor.

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi sumberdaya aparatur terhadap implementasi peraturan perundang-undangan dan dalam pemberian pelayanan kepada wajib pajak serta pengelolaan pendapatan daerah yang optimal. Program ini dilaksanakan dengan kegiatan yaitu :

- 1) Bimbingan teknis pengelolaan pendapatan daerah.

d. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam melaksanakan pertanggung jawaban kinerja dan keuangan OPD sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal. Program ini dilaksanakan dengan kegiatan yaitu:

- 1) Penyusunan Renja Renstra SKPD;
- 2) Pembuatan laporan pendapatan.

e. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan sehingga pemberian layanan dapat berjalan optimal. Program ini meliputi kegiatan :

- 1) Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
- 2) Kegiatan penanganan keberatan, pengurangan dan kompensasi.

f. Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah asli daerah secara optimal melalui langkah dari perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan pendapatan daerah. Program ini meliputi kegiatan :

- 1) Pendataan pajak daerah;
- 2) Rapat koordinasi pengelolaan PAD;
- 3) Kegiatan penelitian dan verifikasi SSPD BPHTB;
- 4) Kegiatan perhitungan dan penetapan pajak daerah;
- 5) Rekonsiliasi penerimaan PAD;
- 6) Penagihan pajak daerah;
- 7) Koordinasi PPJ PLN;
- 8) Pemeliharaan hardware/software sistem informasi;
- 9) Pengadaan hardware/software sistem informasi;
- 10) Penyusunan dan perubahan produk hukum bidang pajak daerah;
- 11) Verifikasi tunggakan PBB P2;
- 12) Analisa Zona Nilai Tanah.

g. Program Peningkatan/Pembinaan Sadar Pajak

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran bagi wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga diharapkan kedepannya dapat tertanam pada diri setiap wajib pajak bahwa membayar pajak bukanlah sesuatu yang memberatkan tetapi sadar bahwa pajak tersebut merupakan kewajiban yang harus dibayar guna suksesnya pembangunan di daerah.

Program ini meliputi kegiatan :

- 1) Pemeriksaan pajak daerah
- 2) Penegakan hukum Perda Pajak Daerah;
- 3) Bimbingan teknis/sosialisasi peraturan pajak daerah;
- 4) Pembuatan media informasi pajak daerah.

Secara lengkap rumusan program, kegiatan dan kebutuhan dana/pagu indikatif Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021 tersaji pada lampiran renja ini.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan sebagai acuan untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai pada Tahun 2021 guna mendukung tercapainya sasaran pembangunan daerah Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021.

Rencana kerja disusun berdasarkan kebutuhan dan perencanaan dari OPD yang akan melaksanakan program/ kegiatan yang prioritas spesifik sesuai dengan kebutuhan dalam pengelolaan pencapaian target penerimaan pendapatan daerah yang optimal.

Semoga dengan tersusunnya Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2021 ini dapat dijadikan sebagai acuan pemangku kepentingan terkait dan dapat meningkatkan kinerja serta pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai guna tercapainya program pembangunan yang telah direncanakan. Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen renja ini semoga ini menjadi salah satu bukti bakti kita kepada NKRI khususnya Kabupaten Serdang Bedagai yang tercinta.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani		100%	Rp 1.619.300.000				
1.1	Pelayanan dokumentasi dan arsip OPD	Terpelihara dan tertatanya dokumentasi dan arsip OPD	Serdang Bedagai	1 tahun	Rp. 18.900.000	APBD Kabupaten	-	1 tahun	Rp. 20.000.000
1.2	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya rakor/perjalanan dinas ke luar daerah	Luar daerah	1 tahun	Rp. 120.000.000	APBD Kabupaten	-	1 tahun	Rp. 132.000.000
1.3	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman dalam pelaksanaan rapat dan kunjungan tamu	Serdang Bedagai	1 tahun	Rp. 55.000.000	APBD Kabupaten	-	1 tahun	Rp. 60.500.000
1.4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK	Serdang Bedagai	1 tahun	Rp. 399.600.000	APBD Kabupaten	Kegiatan Pendukung 21 Peraihan	1 tahun	Rp. 439.560.000
1.5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor	Serdang Bedagai	1 tahun	Rp. 140.000.000	APBD Kabupaten	Kegiatan Pendukung 21 Peraihan	1 tahun	Rp. 154.000.000

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional	Serdang Bedagai	1 tahun / 10 unit mobil	Rp. 390.000.000	APBD Kabupaten	Kegiatan Pendukung 21 Peraihan	1 tahun / 10 unit mobil	Rp. 429.000.000
1.7	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya sarana pendukung kegiatan surat menyurat	Serdang Bedagai	1 tahun	Rp. 5.000.000	APBD Kabupaten	-	1 tahun	Rp. 5.500.000
1.8	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan dokumen	Serdang Bedagai	1 tahun	Rp. 319.000.000	APBD Kabupaten	Kegiatan Pendukung 21 Peraihan	1 tahun	Rp. 350.900.000
1.9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Serdang Bedagai	1 tahun	Rp. 25.000.000	APBD Kabupaten	Kegiatan Pendukung 21 Peraihan	1 tahun	Rp. 27.500.000
1.10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Serdang Bedagai	1 tahun	Rp. 22.600.000	APBD Kabupaten	Kegiatan Pendukung 21 Peraihan	1 tahun	Rp. 24.860.000
1.11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya rakor/perjalanan dinas ke dalam daerah	Serdang Bedagai	1 tahun	Rp. 25.000.000	APBD Kabupaten	-	1 tahun	Rp. 27.500.000
1.12	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/teknis	Terpenuhinya tenaga administrasi/teknis sesuai dengan kebutuhan	Serdang Bedagai	1 tahun	Rp. 70.000.000	APBD Kabupaten	-	1 tahun	Rp. 77.000.000

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.13	Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan	Serdang Bedagai	1 tahun	Rp. 29.200.000	APBD Kabupaten	-	1 tahun	Rp. 32.100.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		100%	Rp 230.000.000				
2.1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Serdang Bedagai	1 tahun	Rp. 80.000.000	APBD Kabupaten	Kegiatan Pendukung 21 Peraihan	1 tahun	Rp. 100.000.000
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor secara berkala	Serdang Bedagai	1 tahun	Rp. 150.000.000	APBD Kabupaten	Kegiatan Pendukung 21 Peraihan	1 tahun	Rp. 180.000.000
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis dan fungsional		15%	Rp 36.000.000				
3.1	Bimbingan Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek Pengelolaan Pendapatan Daerah	Luar daerah	6 orang	Rp. 36.000.000	APBD Kabupaten	Kegiatan Pendukung 21 Peraihan	8 orang	Rp. 48.000.000
4	Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Persentase realisasi PAD terhadap pendapatan daerah		10%	Rp 2.185.000.000				

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.1	Kegiatan Penelitian dan Verifikasi SSPD BPHTB	Jumlah SSPD BPHTB yang diteliti dan diverifikasi	Serdang Bedagai	2000 SSPD BPHTB	Rp. 30.000.000	APBD Kabupaten	Kegiatan Pendukung 21 Peraihan	2250	Rp. 33.000.000
4.2	Koordinasi PPJ PLN	Tersedianya SPTPD dan SSPD PPJ	Luar daerah	1 tahun	Rp. 20.000.000	APBD Kabupaten	Kegiatan Pendukung 21 Peraihan	1 tahun	Rp. 22.000.000
4.3	Pendataan Pajak Daerah	Tersedianya data wajib pajak daerah yang akurat	Serdang Bedagai	17 Kec	Rp. 690.000.000	APBD Kabupaten	Kegiatan Pendukung 21 Peraihan	17 Kec	Rp. 759.000.000
4.4	Kegiatan Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah	Tersedianya Nota Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah	Serdang Bedagai	1 tahun	Rp. 75.000.000	APBD Kabupaten	Kegiatan Pendukung 21 Peraihan	1 tahun	Rp. 82.500.000
4.5	Rapat Koordinasi Pengelolaan PAD	Meningkatnya realisasi PAD	Serdang Bedagai	1 tahun	Rp. 75.000.000	APBD Kabupaten	Kegiatan Pendukung 21 Peraihan	1 tahun	Rp. 82.500.000
4.6	Rekonsiliasi Penerimaan PAD	Tersedianya data Penerimaan PAD yang akurat	Serdang Bedagai	1 tahun	Rp. 55.000.000	APBD Kabupaten	Kegiatan Pendukung 21 Peraihan	1 tahun	Rp. 60.500.000

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.7	Penagihan pajak daerah	Terlaksananya penagihan pajak daerah	Serdang Bedagai	1 tahun	Rp. 640.000.000	APBD Kabupaten	Kegiatan Pendukung 21 Peraihan	1 tahun	Rp. 715.000.000
4.8	Pemeliharaan Hardware/Software Sistem Informasi	Sistem Informasi beroperasi dengan lancar	Serdang Bedagai	1 tahun	Rp. 30.000.000	APBD Kabupaten	Kegiatan Pendukung 21 Peraihan	1 tahun	Rp. 33.000.000
4.9	Pengadaan Hardware/Software Sistem Informasi	Tersedianya Sistem Informasi	Serdang Bedagai	1 tahun	Rp. 170.000.000	APBD Kabupaten	Kegiatan Pendukung 21 Peraihan	1 tahun	Rp. 180.000.000
4.10	Penyusunan & Perubahan Produk Hukum Bidang Pajak Daerah	Terlaksananya Penyusunan & Perubahan Produk Hukum Bidang Pajak Daerah	Serdang Bedagai	1 tahun	Rp. 150.000.000	APBD Kabupaten	Kegiatan Pendukung 21 Peraihan	1 tahun	Rp. 165.000.000
4.11	Verifikasi Tunggakan PBB P2`	Tersedianya data tunggakan PBB P2 yang akurat	Serdang Bedagai	17 Kec	Rp. 80.000.000	APBD Kabupaten	Kegiatan Pendukung 21 Peraihan	17 Kec	Rp. 100.000.000
4.12	Analisa zona nilai tanah	Tesedianya zona nilai tanah	Serdang Bedagai	1 Kec	Rp. 170.000.000	APBD Kabupaten	Kegiatan Pendukung 21 Peraihan	2 Kec	Rp. 350.000.000

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan	Persentase keluhan yang ditindaklanjuti		100%	Rp 24.500.000				
5.1	Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM pelayanan pajak daerah	Serdang Bedagai	85	Rp. 12.500.000	APBD Kabupaten	Kegiatan Pendukung 21 Peraihan	85	Rp. 13.750.000
5.2	Kegiatan penanganan keberatan, pengurangan dan kompensasi	Terlaksananya penanganan keberatan, pengurangan dan kompensasi dari wajib pajak	Serdang Bedagai	1 tahun	Rp. 12.000.000	APBD Kabupaten	Kegiatan Pendukung 21 Peraihan	1 tahun	Rp. 13.200.000
6	Program Peningkatan/Pembinaan Sadar Pajak	Persentase wajib pajak yang taat membayar pajak		85,97%	Rp 230.000.000				
6.1	Pemeriksaan Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak daerah yang diperiksa	Serdang Bedagai	20 WP	Rp. 70.000.000	APBD Kabupaten	Kegiatan Pendukung 21 Peraihan	25 WP	Rp. 80.000.000
6.2	Penegakan hukum Perda Pajak Daerah	Tertib administrasi perpajakan daerah	Serdang Bedagai	1 tahun	Rp. 30.000.000	APBD Kabupaten	Kegiatan Pendukung 21 Peraihan	1 tahun	Rp. 40.000.000
6.3	Bimbingan teknis/sosialisasi peraturan pajak daerah	Jumlah peserta Bimbingan teknis/sosialisasi peraturan pajak daerah	Serdang Bedagai	100 orang	Rp. 60.000.000	APBD Kabupaten	Kegiatan Pendukung 21 Peraihan	100 orang	Rp. 60.000.000

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.4	Pembuatan Media Informasi pajak daerah	Jumlah Media Informasi yang diadakan	Serdang Bedagai	220 buah	Rp. 70.000.000	APBD Kabupaten	Kegiatan Pendukung 21 Peraih	220 buah	Rp. 88.000.000
7	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan (10 Laporan)		100%	Rp 60.000.000				
7.1	Penyusunan Renja Renstra SKPD	Tersusunnya dokumen Renja Renstra SKPD	Serdang Bedagai	2 dokumen	Rp. 10.000.000	APBD Kabupaten	-	1 dokumen	Rp. 5.000.000
7.2	Pembuatan Laporan Pendapatan	Tersedianya Laporan Pendapatan	Serdang Bedagai	1 dokumen	Rp. 50.000.000	APBD Kabupaten	Kegiatan Pendukung 21 Peraih	1 tahun	Rp. 60.000.000
	TOTAL				Rp. 4.384.800.000				